

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Tahun Anggaran 2018. LKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2018 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan rencana kinerja (target kinerja) Tahun Anggaran 2018, sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2018 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukan sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja di masa mendatang

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Cimahi selaku perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi diwajibkan menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan guna menerapkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran biaya.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perhubungan Kota Cimahi :

1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

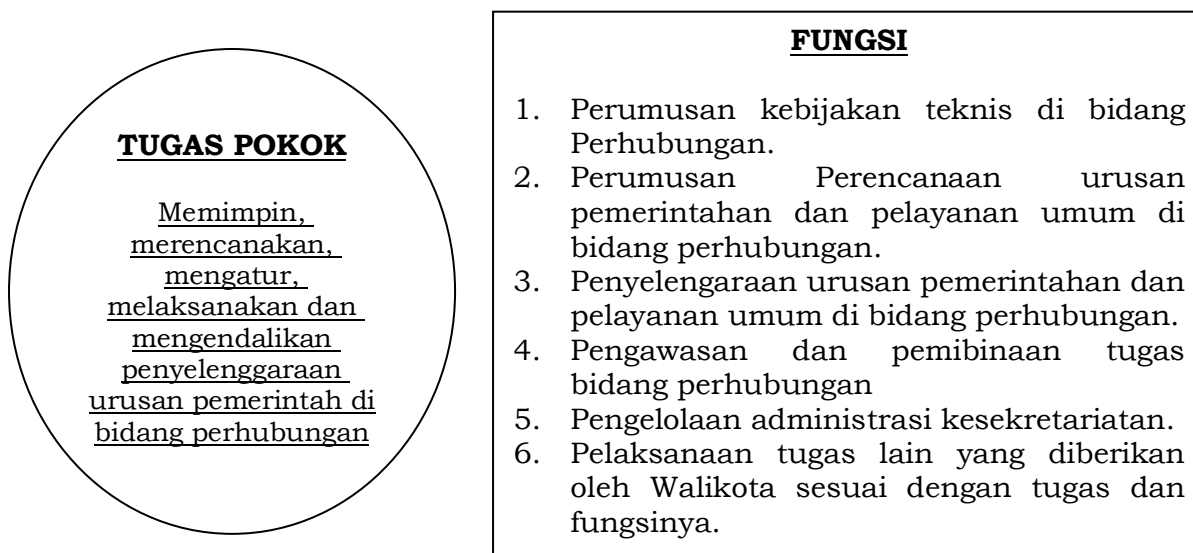
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 226), tanggal 18 Desember 2017;

15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi;
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 383), tanggal 18 Desember 2017.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kota Cimahi.



1.4 PERMASALAHAN DAN ISSUE STRATEGIS

1.4.1 Permasalahan atau Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada perencanaan pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

1. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi
3. Terbatasnya prasarana jalan dan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)
4. Perlunya penataan sarana angkutan umum
5. Penggunaan badan jalan diluar kepentingan lalu lintas (PKL, Parkir, dll)
6. Volume pergerakan kendaraan dan orang yang cukup tinggi
7. Belum optimalnya penataan ruas jalan dan persimpangan untuk mendukung pergerakan kendaraan
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan tertib lalu lintas
9. Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan menyebabkan arus lalu lintas terhambat dan tidak optimal.

Jalan dengan status jalan kota di Kota Cimahi merupakan peningkatan status jalan dari jalan kecamatan, sehingga kapasitas yang ada

sebenarnya belum dapat menampung jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Jalan di Kota Cimahi masih rendah.

Selain permasalahan kapasitas jalan, Kota Cimahi juga belum memiliki jalan lingkar selatan sebagai akses alternatif bagi kendaraan lintas kota yang melintasi Kota Cimahi. Oleh karena itu, kendaraan antar kota masih melewati dalam kota Kota Cimahi dan berimbas pada semakin macetnya lalu lintas dalam kota. Selain karena belum adanya jalan lingkar selatan diketahui juga bahwa masih rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kemacetan dari timur ke barat (padalarang ke Bandung). Adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di daerah Gatot Subroto dan Sriwijaya juga menambah tingkat kemacetan di Kota Cimahi.

Saat ini Kota Cimahi hanya memiliki 3 terminal tipe C. Kelas terminal tersebut hanya melayani angkutan umum dengan rute dalam perkotaan atau pedesaan. Sementara itu, dengan kondisi geografis yang strategis sebagai wilayah transit sekaligus rute angkutan umum yang sangat aktif bagi angkutan umum dari Bandung Barat maupun Kota Bandung.

Kota Cimahi seharusnya sudah memiliki prasarana terminal antar kota dalam provinsi. Saat ini, terdapat 16 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di wilayah perbatasan antara Kota Cimahi, Bandung dan Bandung barat yang harus dilayani. Akan tetapi, sampai saat ini belum tersedia terminal tipe B.

Angkutan umum yang melalui Kota Cimahi hanya diakomodasi oleh *pull/counter* bus di pinggir-pinggir jalan arteri sehingga mengurangi LoS.

Ketersediaan dan kapasitas terminal tipe c yang tersedia saat ini juga masih kurang memadai. Terminal Pasar Atas masih dalam kondisi rusak paska kebakaran dan sampai saat ini belum direhabilitasi. Kapasitas terminal lain tidak sepadan dengan jumlah arus penumpang dan frekuensi angkutan umum yang melalui terminal. Akibatnya, banyak titik-titik penumpukan angkutan di luar area terminal.

Sementara itu, jumlah angkutan umum cenderung meningkat sejak tahun 2012 lalu. Oleh karena itu, kebutuhan prasarana perhubungan di Kota Cimahi bukan hanya persoalannya tidak tersedianya terminal antar kota dalam provinsi saja, akan tetapi kapasitas terminal yang ada harus ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan mobilisasi lalu-lintas di masa datang.

Selain jumlah angkutan umum yang cenderung meningkat, persoalan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya fasilitas perhubungan jalan. Beberapa radius tikung harus ditingkatkan kapasitasnya seperti memperjelas rambu-rambu, memfasilitasi speed-bumper dan kelengkapan lainnya. Hal tersebut penting untuk diupayakan untuk mengurangi tingkat kemacetan serta meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di beberapa kawasan seperti di Jl. Cihanjuang, Jl. HMS Mintareja-Baros, serta radius tikung lainnya yang rawan kemacetan dan kecelakaan.

1.4.2 Issue Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi
- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

- Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
- Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang yang berbasis IT disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang berteknologi tinggi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka isu strategis yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan perlu penanganan segera dan intens yaitu **masalah kemacetan**, dimana kemacetan di Kota Cimahi sangat tinggi pada jam tertentu dan ruas jalan tertentu (Jalan nasional) yang mengakibatkan kemacetan ke jalan lokal. Masalah kemacetan bisa mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama, kesemerawutan bahkan mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan.

1.4.3 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Peluang dalam kurun 5 tahun kedepan antara lain :

1. Pengembangan konsep sistem transportasi massal (Mass Transport) berbasis busline dan cable car atau monorel bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (sesuai RTRW 2012-2032).
2. Konsep Terminal Terpadu yang memadukan moda transportasi kereta api dan Terminal di Kota Cimahi.

1.5. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota

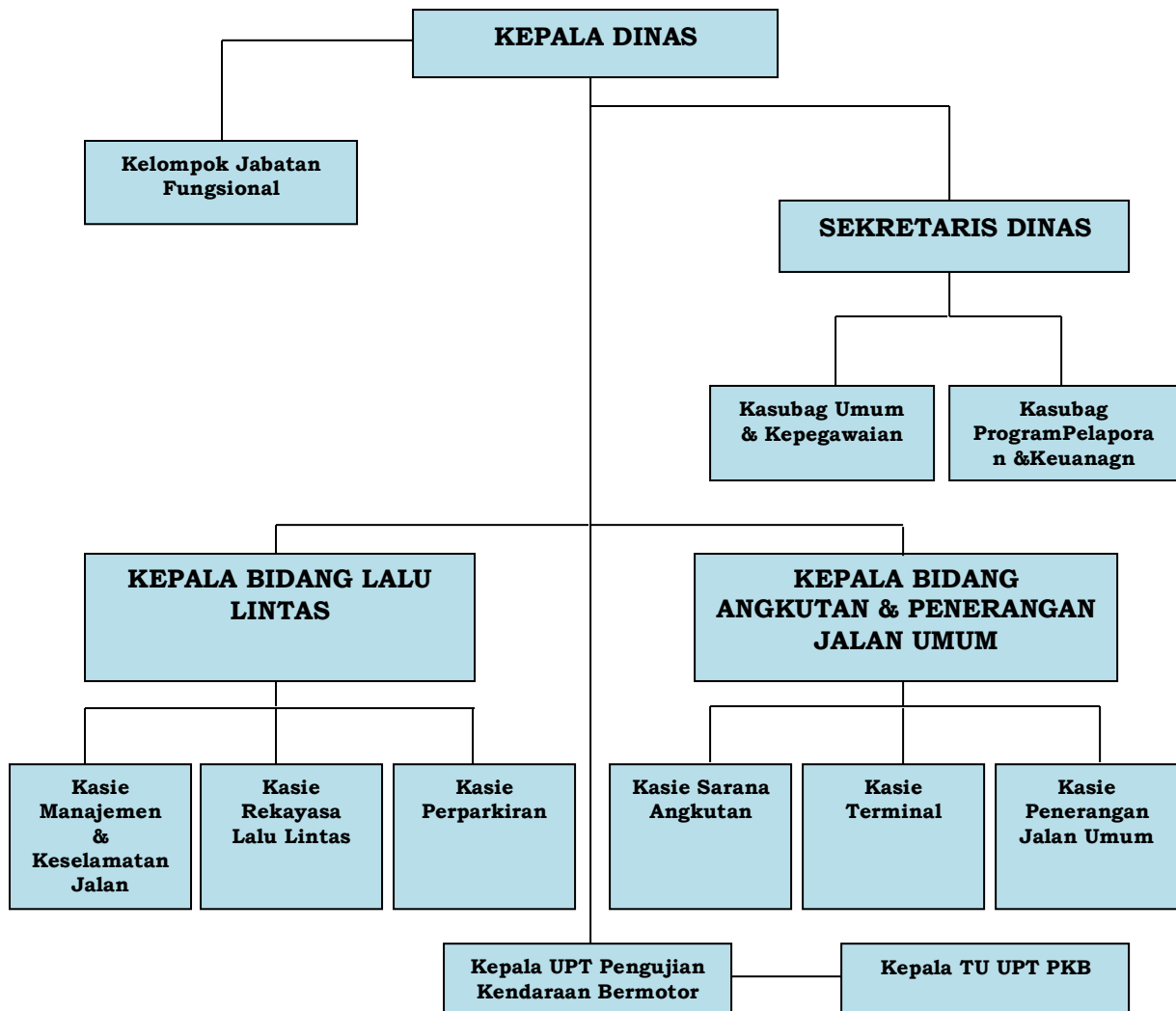
Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas perhubungan kota cimahi mempunyai typelogi dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Sarana Angkutan
 - c. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum
4. Kepala Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Kepala Seksi Perparkiran
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Kasubag TU Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

TAHUN ANGGARAN 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Melalui berbagai kegiatan tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Cimahi untuk mencapainya pada Tahun 2018.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tentunya berpedoman pada RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan. seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2017-2022 perlu diadakan revisi untuk lebih menajamkan dan menyesuaikan kebutuhan daerah dan organisasi untuk menuju ke arah yang lebih berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan akuntabel.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

VISI

“ TERWUJUDNYA TRANSFORTASI YANG ANDAL “

Penetapan visi ini didasarkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib, lancar, berkeselamatan kepada masyarakat.

ANDAL, yaitu dapat menjamin bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan transfortasinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, lancar, berkeselamatan berdasarkan prinsip :

- Berkeadilan
- Keterjangkauan
- Berwawasan lingkungan

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai. Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

MISI

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Angkutan Umum.
 - Tujuan :
Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan
 - Sasaran :
Meningkatkan aksebilitas pelayanan transfortasi
- b. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas.
 - Tujuan :
Terselenggaranya lalu lintas yang tertib dan lancar
 - Sasaran :
Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan : sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai Implementasi dari Misi Dinas.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang efektif. Berdasarkan isu strategis, Sasaran yang ingin dicapai Kota Cimahi adalah **tingkat pelayanan jalan (LOS)**, sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi **Meningkatkan kelancaran lalu lintas**. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi

Kelancaran lalu lintas harus didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang transportasi baik kuantitas maupun kualitas, titik kemacetan maupun simpul kemacetan bisa diatasi, peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT dengan penggunaan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi, dan pelaksanaan sosialisasi maupun penegakan hukum

- b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Kelancaran dan keselamatan lalu lintas harus didukung dengan sarana prasarana penunjang transportasi, titik kemacetan maupun simpul kemacetan bisa diatasi, dan terjadinya penurunan kawasan rawan kecelakaan.

TABEL 2.1**MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA**

VISI	MISI	TJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
TERWUJUDNYA TRANSFORTASI YANG ANDAL	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Angkutan Umum	1. Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang aman, berkeselamatan dan terjangkau sesuai dengan Undang-undang	1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transfortasi	1. Jumlah angkutan umum laik jalan 2. Persentase kawasan yang terlayani angkutan umum 3. Persentase jl.kolektor dan jl.alteri kota cimahi yang terlayani angkutan umum
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas	2. Menciptakan transportasi yang tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan	2. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalin	1. Jumlah titik kemacetan yang di jalan raya yang berhasil diatasi 2. Kecepatan Rata-rata pada simpul macet 3. Rasio prasarana lalu lintas 4. Persentase Penurunan Kecelakaan di Black Spot

2.1.3 Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi yaitu keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan).
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan
3. Meningkatkan pelayanan angkutan

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan visi misi maupun sasaran strategis serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, maka sebagai pedoman/petunjuk Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
2. Peningkatan sarana prasarana perparkiran
3. Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Peningkatan kualitas Alat Uji.
5. Rekayasa Lalu Lintas.

6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas.
7. Meningkatkan Angkutan Penumpang dan Barang

2.1.5 Program Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi didukung oleh beberapa program yang termuat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menyusun perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam laporan Penetapan Kinerja (PK).

2.2.1 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cimahi setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang

merupakan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Target dari indikator kinerja kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menetapkan beberapa penetapan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, target dan program serta anggaran untuk tahun 2018, sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D

Adapun jumlah program dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 ini sebanyak 10 Program dan 48 Kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 34.915.427.774,-, dengan uraian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.006.663.099,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.810.421.100,-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 187.700.000,-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 436.841.200,-
5	Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp. 214.221.000,-

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 1.221.253.500,-
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 683.785.000,-
8	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 2.481.314.100,-
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 205.149.000,-
10	Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas.	Rp. 18.074.079.775,-
JUMLAH		Rp. 34.915.427.774,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN 2018

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2022, dan dituangkan lebih lanjut pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018. Selain itu dibahas akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja instansi Dinas Perhubungan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menyiapkan/menyusun perencanaan strategis, penganggaran dan monitoring evaluasi program dan kegiatan, sehingga terdapat keselarasan kinerja antara perencanaan dan penganggaran.

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2018 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 juga menguraikan tentang penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)

Untuk dapat mempermudah membuat simpulan hasil pengukuran kinerja, ditetapkan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- > 100% : Sangat Baik (SB)
- 70% s.d < 100%: Baik (B)
- 50% s.d < 70%: Cukup (C)
- < 50% : Kurang (K)

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas)	Andalalin	12	4	33%	Kurang (K)

		dan angkutan jalan).					
			Dokumen TC	2	1	50%	Cukup (C)
			Terpenuhi rambu-rambu lalu lintas 75x75cm	125	125	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi fasilitas RPPJ uk 120 cm x 240 cm	10	10	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi fasilitas cermin tikung	35	35	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi fasilitas rambu tiang F double daun uk 75 cm x 75 cm	20	20	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi fasilitas warning light solar cell	3	3	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi fasilitas rambu elektronik	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi	2	2	100%	Sangat Baik (SB)

			portal pembatas kendaraan				
			Terpenuhi Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Marka jalan)	7.837	7.837	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpasangnya marka kuning (larangan parkir)	1.090	1.090	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpasangnya marka Zoss	1.270	1.270	100%	Sangat Baik (SB)
			Tersedianya speed bumper	348	348	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpenuhi Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan)	189	189	100%	Sangat Baik (SB)
			Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Umum	193	193	100%	Sangat Baik (SB)
			Terbangunnya Penerang	120	120	100%	Sangat Baik (SB)

			an Jalan Lingkung an				
			Terbangu nnya PJU Gang	2.220	2.220	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpeliha ranya Lampu Penerang an Jalan Umum	1.000	1.000	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpeliha ranya Lampu Penerang an Jalan Lingkung an	750	750	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpeliha ranya Lampu Penerang an Jalan Gang	600	600	100%	Sangat Baik (SB)
2		Meningk atkan pengend alian dan pengam anan lalu lintas angkuta n jalan	Terlaksan anya pengenda lian lalu lintas regular	2	1	50%	Cukup (C)
			Terlaksan anya pengenda lian lau lintas idul fitri	2	2	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksan anya	1	1	100%	Sangat Baik (SB)

			pengenda lian lau lintas idul adha				
			Terlaksan anya pengenda lian lau lintas pemiluka da Provinsi	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksan anya pengenda lian lau lintas natal tahun baru	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksan anya pengenda lian lau lintas fly over padasuka	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			titik Pantau cctv di 3 Terminal	3	0	0	Kurang (K)
			Pemelihar aan CCTV	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Pengadaa n Drone dan penduku ngnya	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksan anya operasi penegaka n hukum gabungan	8	8	100%	Sangat Baik (SB)

			Terlaksananya pengawasan kendaraan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya	4	4	100%	Sangat Baik (SB)
			operasi penegakan hukum di terminal	8	8	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya Penyuluhan pengemudi angkutan umum	3	3	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya Cek kesehatan pengemudi angkutan umum	3	3	100%	Sangat Baik (SB)
			Plang Tanda Razia	4	4	100%	Sangat Baik (SB)
			Lomba cerdas cermat	1	1	100%	
			Forum lalu lintas	4	4	100%	Sangat Baik (SB)
			Sosialisasi keselamatan berlalu	1	1	100%	Sangat Baik (SB)

			lintas				
			Safety Riding	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Dokumen Rancangan Perda Gembok Parkir	1	0	0	Kurang (K)
			Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya kegiatan gakum parkir	8	8	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya monitoring parkir	12	12	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya sosialisasi petugas parkir	2	2	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya penertiban Parkir kegiatan insidentil	6	6	100%	Sangat Baik (SB)
			Pemasangan rambu papan tarif parkir	12	12	100%	Sangat Baik (SB)
			Penyediaan marka	1	1	100%	Sangat Baik (SB)

			parkir				
			Pemeliharaan papan tarif parkir	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Kendaraan wajib uji	(5.000x2=10.000)	5.000x2=10.000)	100%	Sangat Baik (SB)
			Dokumen laporan bulanan	25	25	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpeliharanya peralatan uji PKB Tahun 2018	10	10	100%	Sangat Baik (SB)
			Pengadaan Alat Uji Side Slip	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Terlaksananya pemeliharaan gedung PKB	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
3		Meningkatnya pelayanan angkutan	Pendataan angkutan orang dalam trayek	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Pendataan angkutan orang tidak dalam trayek	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Pendataan angkutan barang	1	1	100%	Sangat Baik (SB)

			Mudik gratis lebaran	1	1	100%	Sangat Baik (SB)
			Pengawasan angkutan karyawan dan barang	6	6	100%	Sangat Baik (SB)
			Pengembangan trayek perkotaan	2	2	100%	Sangat Baik (SB)
			Sosialisasi Penyedia Jasa layanan terhadap angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan barang	3	3	100%	Sangat Baik (SB)
			Terfasilitasinya sewa terminal	12	12	100%	Sangat Baik (SB)
			terselenggaraanya pengelolaan terminal	12	12	100%	Sangat Baik (SB)
			Terbangunnya unit shelter / halte	2	2	100%	Sangat Baik (SB)
			Terpeliharanya 11 unit shelter /	11	11	100%	Sangat Baik (SB)

			halte				
			Terpelihara nya Terminal Angkutan Darat Tipe C di Kota Cimahi	1	1	100%	Sangat Baik (SB)

Analisis terhadap sasaran strategis ***meningkatnya kelancaran lalu lintas***, dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan). Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja yang hendak dicapai dari kegiatan :
 1. perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,
 2. pengadaan rambu-rambu lalu lintas,
 3. pengadaan marka jalan,
 4. pengadaan pagar pengaman jalan,
 5. pengadaan penerangan jalan umum,
 6. pemeliharaan penerangan jalan umum,

rata-rata pada skala predikat Baik (B) dengan pencapaian realisasi kinerja 94,15%
- b) Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja yang hendak dicapai dari kegiatan :
 1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan,
 2. penataan sarana dan prasarana penunjang parkir,
 3. rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor,
 4. rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor,

5. penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang,
 6. uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang,
 7. pengendalian disiplin pengoprasi angkutan umum di jalan raya,
 8. sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan,
 9. koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan,
 10. rekayasa lalu lintas,
 11. pengadaan dan pemeliharaan alat pemantau kemacetan, rata-rata pada skala predikat Baik (B) dengan pencapaian realisasi kinerja 92,42%
- c) Meningkatkan pelayanan angkutan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja yang hendak dicapai dari kegiatan:
1. penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal,
 2. pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan,
 3. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan,
 4. Fasilitas perizinan di bidang perhubungan,
 5. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
 6. rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan, rata-rata pada skala predikat Sangat Baik (SB) dengan pencapaian realisasi kinerja 100%

Hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan rata-rata pada skala predikat Baik (B) dengan capaian kinerja 95,52%.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2017	2018
1	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Andalalin	10	4	83%	33%
2		Dokumen TC	2	1	100%	50%
3		Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas 75x75cm	80	125	57%	100%
4		Terpenuhinya fasilitas RPPJ uk 120 cm x 240 cm	6	10	100%	100%
5		Terpenuhinya fasilitas cermin tikung	4	35	100%	100%
6		Terpenuhinya fasilitas rambu tiang F double daun uk 75 cm x 75 cm	0	20	0	100%
7		Terpenuhinya fasilitas warning light solar cell	0	3	0	100%
8		Terpenuhinya fasilitas rambu elektronik	1	1	100%	100%
9		Terpenuhinya portal pembatas kendaraan	0	2	100%	100%
10		Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Marka jalan)	4.000	7.837	100%	100%
11		Terpasangnya marka kuning (larangan parkir)	0	1.090	0	100%
12		Terpasangnya marka Zoss	0	1.270	0	100%
13		Tersedianya speed bumper	272	348	100%	100%

14		Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan)	84	189	100%	100%
15		Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Umum	327	193	100%	100%
16		Terbangunnya Penerangan Jalan Lingkungan	153	120	100%	100%
17		Terbangunnya PJU Gang	2.826	2.220	100%	100%
18		Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum	1.000	1.000	100%	100%
19		Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	750	750	100%	100%
20		Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Gang	400	600	100%	100%
21		Terlaksananya pengendalian lalu lintas regular	1	1	100%	50%
22		Terlaksananya pengendalian lalu lintas idul fitri	1	2	100%	100%
23		Terlaksananya pengendalian lalu lintas idul adha	1	1	100%	100%
24		Terlaksananya pengendalian lalu lintas pemilukada	1	1	100%	100%
25		Terlaksananya pengendalian lalu lintas natal tahun baru	1	1	100%	100%
26		Terlaksananya pengendalian lalu lintas fly over padasuka	0	1	0	100%
27		titik Pantau cctv di 3 Terminal	0	0	0	0

28		Pemeliharaan CCTV	1	1	100%	100%
29		Pengadaan Drone dan pendukungnya	0	1	0	100%
30		Terlaksananya operasi penegakan hukum gabungan	15	8	100%	100%
31		Terlaksananya pengawasan kendaraan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya	4	4	100%	100%
32		operasi penegakan hukum di terminal	10	8	100%	100%
33		Terlaksananya Penyuluhan pengemudi angkutan umum	0	3	0	100%
34		Terlaksananya Cek kesehatan pengemudi angkutan umum	0	3	0	100%
35		Plang Tanda Razia	0	4	0	100%
36		Lomba cerdas cermat	0	1	0	100%
37		Forum lalu lintas	5	4	83%	100%
38		Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	12	1	100%	100%
39		Safety Riding	1	1	100%	100%
40		Dokumen Rancangan Perda Gembok Parkir	0	0	0	0
41		Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1	0	100%
42		Terlaksananya kegiatan gakum parkir	8	8	100%	100%
43		Terlaksananya monitoring parkir	12	12	100%	100%

44		Terlaksananya sosialisasi petugas parkir	1	2	100%	100%
45		Terlaksananya penertiban Parkir kegiatan insidentil	6	6	100%	100%
46		Pemasangan rambu papan tarif parkir	0	12	0	100%
47		Penyediaan marka parkir	0	1	0	100%
48		Pemeliharaan papan tarif parkir	0	1	0	100%
49		Kendaraan wajib uji	4.775	5.00 0x2= 10.0 00)	95,50	100%
50		Dokumen laporan bulanan	24	25	100%	100%
51		Terpeliharanya peralatan uji PKB Tahun 2018	10	10	100%	100%
52		Pengadaan Alat Uji Side Slip	0	1	0	100%
53		Terlaksananya pemeliharaan gedung PKB	1	1	100%	100%
54		Pendataan angkutan orang dalam trayek	0	1	0	100%
55		Pendataan angkutan orang tidak dalam trayek	0	1	0	100%
56		Pendataan angkutan barang	0	1	0	100%
57		Mudik gratis lebaran	1	1	100%	100%
58		Pengawasan angkutan karyawan dan barang	6	6	100%	100%
59		Pengembangan trayek perkotaan	0	2	0	100%
60		Sosialisasi Penyedia Jasa	0	3	0	100%

		layanan terhadap angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan barang				
61		Terfasilitasnya sewa terminal	12	12	100%	100%
62		terselenggaranya pengelolaan terminal	12	12	100%	100%
63		Terbangunnya unit shelter / halte	2	2	100%	100%
64		Terpeliharanya 11 unit shelter / halte	0	11	0	100%
65		Terpeliharanya Terminal Angkutan Darat Tipe C di Kota Cimahi	0	1	0	100%

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 32,85 %, hal ini disebabkan karena adanya penambahan ataupun pengurangan kegiatan dan volume kegiatan yang di Tahun 2017 tidak ditargetkan namun di Tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2018 di Dinas Perhubungan ada penambahan kegiatan penyusunan kebijakan, norma, standard an prosedur bidang perhubungan, kegiatan rahabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan, kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang, kegiatan pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan, kegiatanfasilitas perijinan di bidang perhubungan, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat pemantau kemacetan. Penambahan kegiatan di tahun 2018 terdapat pada indikator dokumen rencana induk jaringan, terpeliharanya terminal angkutan darat tipe c di kota cimahi, terlaksananya penyuluhan pengemudi angkutan umum, terlaksananya cek kesehatan pengemudi angkutan umum, plang tanda razia, terlaksananya pendataan 1 x angkutan orang dalam trayek, terlaksananya pendataan 1 x angkutan orang tidak dalam trayek, terlaksananya pendataan 1 x angkutan barang, terlaksananya sosialisasi

penyedia jasa layanan terhadap angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan barang, pengadaan drone dan pendukungnya.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2017-2022	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2018	Capaian Kinerja	Ket
1	Andalalin	108	4	3,7%	
2	Dokumen TC	10	1	10%	
3	Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas 75x75cm	525	125	23,81%	
4	Terpenuhinya fasilitas RPPJ uk 120 cm x 240 cm	48	10	20,83%	
5	Terpenuhinya fasilitas cermin tikung	105	35	33,33%	
6	Terpenuhinya fasilitas rambu tiang F double daun uk 75 cm x 75 cm	50	20	40%	
7	Terpenuhinya fasilitas warning light solar cell	15	3	20%	
8	Terpenuhinya fasilitas rambu elektronik	9	1	11,11%	
9	Terpenuhinya portal pembatas kendaraan	2	2	100%	
10	Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Marka jalan)	47.000	7.837	16,67%	
11	Terpasangnya marka kuning (larangan parkir)	1.090	1.090	100%	

12	Terpasangnya marka Zoss	1.270	1.270	100%	
13	Tersedianya speed bumper	1.000	348	34,80%	
14	Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan)	1.200	189	15,75%	
15	Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Umum	744	193	25,94%	
16	Terbangunnya Penerangan Jalan Lingkungan	2.287	120	5,25%	
17	Terbangunnya PJU Gang	14.229	2.220	15,60%	
18	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum	3.600	1.000	27,78%	
19	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	8.350	750	8,98%	
20	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Gang	8.800	600	6,82%	
21	Terlaksananya pengendalian lalu lintas regular	5	1	20%	
22	Terlaksananya pengendalian lalu lintas idul fitri	6	2	33,33%	
23	Terlaksananya pengendalian lalu lintas idul adha	5	1	20%	
24	Terlaksananya pengendalian lalu lintas pemilukada	1	1	100%	
25	Terlaksananya pengendalian lalu lintas natal tahun baru	5	1	20%	
26	Terlaksananya pengendalian lalu lintas fly over padasuka	1	1	100%	
27	titik Pantau cctv di 3 Terminal	3	0	0	

28	Pemeliharaan CCTV	5	1	20%	
29	Pengadaan Drone dan pendukungnya	2	1	50%	
30	Terlaksananya operasi penegakan hukum gabungan	60	8	13,33%	
31	Terlaksananya pengawasan kendaraan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya	4	4	100%	
32	operasi penegakan hukum di terminal	50	8	16%	
33	Terlaksananya Penyuluhan pengemudi angkutan umum	12	3	20%	
34	Terlaksananya Cek kesehatan pengemudi angkutan umum	12	3	20%	
35	Plang Tanda Razia	4	4	100%	
36	Lomba cerdas cermat	5	1	20%	
37	Forum lalu lintas	44	4	9,09%	
38	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	5	1	20%	
39	Safety Riding	5	1	20%	
40	Dokumen Rancangan Perda Gembok Parkir	1	0	0	
41	Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	1	100%	
42	Terlaksananya kegiatan gakum parkir	30	8	26,67	
43	Terlaksananya monitoring parkir	60	12	20%	
44	Terlaksananya sosialisasi petugas parkir	5	2	40%	
45	Terlaksananya penertiban Parkir kegiatan insidentil	26	6	23,08	
46	Pemasangan rambu papan tarif parkir	15	12	80%	

47	Penyediaan marka parkir	5	1	20%	
48	Pemeliharaan papan tarif parkir	5	1	20%	
49	Kendaraan wajib uji	42.000	5.000x2=10.000)	23,81%	
50	Dokumen laporan bulanan	125	25	20%	
51	Terpeliharanya peralatan uji PKB Tahun 2018	53	10	18,87%	
52	Pengadaan Alat Uji Side Slip	1	1	100%	
53	Terlaksananya pemeliharaan gedung PKB	5	1	20%	
54	Pendataan angkutan orang dalam trayek	1	1	100%	
55	Pendataan angkutan orang tidak dalam trayek	1	1	100%	
56	Pendataan angkutan barang	1	1	100%	
57	Mudik gratis lebaran	5	1	20%	
58	Pengawasan angkutan karyawan dan barang	6	6	100%	
59	Pengembangan trayek perkotaan	10	2	20%	
60	Sosialisasi Penyedia Jasa layanan terhadap angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan barang	3	3	100%	
61	Terfasilitasinya sewa terminal	60	12	20%	
62	terselenggaranya pengelolaan terminal	60	12	20%	
63	Terbangunnya unit shelter / halte	6	2	33,33%	
64	Terpeliharanya 11 unit shelter / halte	83	11	13,25%	
65	Terpeliharanya Terminal Angkutan Darat Tipe C di Kota Cimahi	5	1	20%	

Pencapaian indikator terhadap target renstra tahun 2017-2022 pada 65 indikator kinerja diatas, rata-rata mencapai 38,17%. Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari rencana strategis 5 tahun program kinerja (program jangka menengah) Dinas Perhubungan. Keberhasilan pencapaian target sampai dengan tahun 2018 terhadap rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 disebabkan karena pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan target tahunan dari renstra Dinas Perhubungan tahun 2017-2022.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDa), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem E-Reporting, Sistem E-Monev, dan Sistem E- Kinerja dalam pengintegrasian sistem / Aplikasi E-Government, maka akan lebih mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah dalam penginputan data atau mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi waktu.

Dengan adanya sistem E-Kinerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang merupakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya :

1. Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Penerangan Jalan Umum

Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, pagar, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur kota, seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Cimahi perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.

2. Sektor Perparkiran

Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran

3. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum

Adanya operasi penegaksn hokum angkutan umum di jalan raya,penertiban angkot yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

4. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.

3.1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Sumber-sumber Anggaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 adalah terdiri dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung.

Sumber Anggaran Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah retribusi, yang terdiri dari :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Umum

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS PENDAPATAN	Target PAD Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Retribusi Parkir	841.800.000	834.585.000	99,14
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	626.529.000	706.494.420	112,76
3	Retribusi Terminal	120.020.000	126.379.000	105,30
4	Retribusi Ijin Usaha Angkutan	31.500.000	13.800.000	43,81
Jumlah		1.619.849.000,00	1.681.258.420,00	110,59

Rincian anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2018

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.303.742.000,-	9.319.803.455,-	90,45
	Gaji dan Tunjangan	4.669.618.000,-	4.036.079.455,-	86,43
	Tambahan Penghasilan PNS	5.634.124.000,-	5.283.724.000,-	93,78
II	BELANJA LANGSUNG	37.190.173.000,-	31.041.664.210,-	83,48
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	9.600.663.099,-	8.449.875.209,-	88,01
1	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.021.745.899,-	7.146.238.905,-	89%
2	Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	125.000.000,-	114.262.272,-	91,40%
3	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	49.344.000,-	47.779.000,-	96,82%
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	72.891.000,-	39.889.000,-	54,72%
5	Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	91.067.700,-	73.900.000,-	81,14%
6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	55.000.000,-	54.846.500,-	99,72%
7	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	638.000.000,-	441.389.900,-	69,18%
8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.900.000,-	8.314.000,-	83,97%
9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-undangan	18.000.000,-	10.285.000,-	57,13%
10	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	25.848.000,-	25.832.000,-	99,93%
11	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	38.600.000,-	36.625.000,-	94,88%
12	Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	455.266.500,-	450.513.632,-	98,95%
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.810.421.100,-	1.328.811.552,-	73,40%
13	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.350.000,-	104.243.000,-	98,94%
14	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.496.630.000,-	1.019.728.552,-	68,13%
15	Kegiatan Penyediaan gudang	208.441.100,-	204.840.000,-	98,27%
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	187.700.000,-	182.599.500,-	97,28%

16	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	68.000.000,-	64.938.500,-	95,49%
17	Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan	119.700.000,-	117.661.000,-	98,29%
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	436.841.200,-	307.197.500,-	70,32%
18	Kegiatan pembinaan pegawai	45.160.000,-	39.720.000,-	87,95%
19	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	391.681.200,-	267.477.500,-	68,28%
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	214.221.000,-	195.873.200,-	91,44%
20	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	143.509.000,-	129.242.600,-	90,05%
21	Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran	14.328.000,-	13.340.500,-	93,10%
22	Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	14.328.000,-	13.410.500,-	93,59%
23	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.016.000,-	23.782.600,-	99,02%
24	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.040.000,-	16.097.000,-	89,22%
VI	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.221.253.500,-	848.980.500,-	69,52%
25	Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	256.199.500,-	39.437.000,-	15,40%
26	Kegiatan penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan	569.969.000,-	460.522.500,-	80,79%
27	Kegiatan penataan sarana dan prasarana penunjang perparkiran	395.085.000,-	349.021.000,-	88,34%
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	683.785.000,-	660.724.600,-	96,63%
28	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	346.685.000,-	338.167.000,-	97,54%
29	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	256.800.000,-	244.030.600,-	95,02%
30	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	80.300.000,-	78.527.000,-	97,79%

VIII	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.481.314.100,-	2.077.499.138,-	83,73%
31	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	193.388.500,-	185.534.888,-	95,93%
32	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	257.498.400,-	225.024.000,-	87,38%
33	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	341.394.000,-	299.703.000,-	87,78%
34	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	823.176.000,-	812.658.500,-	98,72%
35	Kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	32.360.000,-	30.357.500,-	93,81%
36	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	311.103.000,-	222.776.500,-	71,60%
37	Kegiatan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	157.885.500,-	155.151.000,-	98,26%
38	Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	268.939.700,-	114.384.750,-	42,53%
39	Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	95.569.000,-	31.909.000,-	33,38%
IX	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	205.149.000,-	200.914.500,-	97,94%
40	Kegiatan pembangunan gedung terminal	0	0	0
41	Kegiatan pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	205.149.000,-	200.914.500,-	97,93%
X	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	18.074.079.775,-	16.435.132.011,-	90,93%
42	Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1.287.209.000,-	1.185.371.500,-	92,08%
43	Kegiatan pengadaan marka jalan	2.825.169.400,-	2.797.094.000,-	99%
44	Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan	332.494.000,-	306.929.518,-	92,31%
45	Kegiatan pengadaan penerangan jalan umum	9.618.245.175,-	8.797.974.517,-	91,47%
46	Kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum	3.235.092.300,-	2.985.014.476,-	92,26%
47	Kegiatan rekayasa lalu lintas	342.331.900,-	193.241.000,-	56,44%
48	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat pemantau kemacetan	433.538.000,-	169.507.000,-	39,09%
	JUMLAH	34.915.427.774,-	30.687.607.710,-	87,89%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2018 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan dan pengendalian sistem transportasi melalui sektor sarana dan prasarana yang akan dilakukan untuk perbaiki kedepannya adalah Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Dampak Positif :

- Pengalihan Arus
- Tata tertib berlalu lintas
- Keselamatan Lalu Lintas

Sektor Perparkiran

Dampak Positif :

- Penataan Lahan/Ruang Parkir
- Kendaraan yang melakukan parkir liar ada tindakan

Sektor Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum

Dampak Positif :

- Monitoring angkutan umum dilaksanakan untuk menertibkan dan menata angkutan umum yang selanjutnya diupayakan agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum yang layak untuk mengurangi kemacetan

Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Dampak positifnya :

Inventaris kendaraan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan